

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

**Oktavie Fresiliasari**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang

Email: octafresilia@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of the government's internal control system variables and the competency of village government officials on fraud prevention with accountability as an intervening variable. This research is a survey research. Questionnaires were distributed to respondents using a mail survey. The research object was the Village Government in Aimas District, Sorong Regency, with a research population of 231 respondents, with a total sample of 120. Respondents' answers were processed as many as 108. The sample used purposive sampling method. The collected data were analyzed using the Partial Least Square (PLS) method with the WarpPLS software version 7.0. The results of the study show that the government's internal control system has a significant positive effect on accountability and fraud prevention. While competence has no effect on accountability, competence has a significant positive effect on fraud prevention. The results of the mediation test confirmed that accountability is an intervening variable related to the effect of the government's internal control system on fraud prevention, whereas accountability is not an intervening variable related to the influence of competence on fraud prevention.*

**Keywords:** *Government internal control system, village government apparatus competence, fraud prevention, accountability.*

**1. PENDAHULUAN**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang jelas dan tegas mengenai diterapkannya asas desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Undang-undang tersebut telah mendekatkan pembangunan terhadap desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Prioritas pembangunan pemerintah sesuai program Nawa cita pemerintah yaitu untuk meningkatkan pembangunan di desa. Pembangunan desa melalui dana desa menjadi suatu prioritas pemerintah saat ini, sebab untuk pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Menurut PP tersebut, dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab maka merupakan penegasan bahwa pengelolaan dana desa harus terbebas dari praktik korupsi. Korupsi telah dianggap sebagai kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di sektor publik. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja

untuk memperoleh keuangan dengan cara mendapatkan uang, aset, dan lainnya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Laksmi dan Sujana, 2019).

Fenomena kasus korupsi/*fraud* dana desa yaitu pada data ICW mencatat korupsi di sector anggaran desa menjadi kasus yang banyak ditindak oleh aparat penegak hukum seperti pada tahun 2019 sebanyak 46 kasus korupsi (kompas.com, 2020) dan pada tahun 2020 kasus korupsi anggaran desa sebanyak 44 kasus. Selain fenomena kasus tersebut, praktik korupsi penyalahgunaan dana desa juga terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat tepatnya di Kampung Warga Nusa II sebanyak Rp 844 juta (klikpapua.com, 2020).

Berdasarkan fenomena tersebut maka, diperlukannya tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan (Eldayanti dkk, 2020).

Tindakan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ayem dan Kusumasari, 2020). Sistem pengendalian intern dilakukan sesuai dengan pedoman

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tolak ukur dan standar pengendalian pelaksanaan dana desa. SPIP menjaga proses operasi pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor lain yang mempengaruhi pencegahan terjadinya *fraud* adalah diperlukannya kompetensi aparatur pemerintah desa. Menurut Laksmi dan Sujana, (2019) mengatakan bahwa pemerintah desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur pemerintah desa yang berkompoten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Penelitian mengenai pengaruh SPIP dan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan *fraud* khususnya dalam pengelolaan dana desa masih rawan sekali terjadi, namun menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut penelitian SPIP terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan Joseph (2015), Atmadja (2017), Adeleke (2019), Laksmi (2019), dan Yusuf (2021) mengungkapkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan Usman (2015), Wonar (2018), Eldayanti (2020), Sofia (2020) dan Suandewi (2021) yang mengungkapkan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan Huslina (2015), Widiyarta (2017), Wahyuni (2018), Wonar (2018), dan Laksmi (2019) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan Durnila (2018), Huda (2018), Mahdi (2020), Eldayanti (2020) dan Sariwati (2021) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan *fraud*, juga memberikan hasil *research gap* seperti pada variabel SPIP. Oleh karena itu pada variabel SPIP dan

kompetensi aparatur pemerintah desa diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menerangkan hubungan kausal antara SPIP dan kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap pencegahan *fraud*. Maka dalam penelitian ini, menambahkan variabel akuntabilitas sebagai variabel intervening. Pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangat penting dilakukan demi tercapainya aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Saputri, 2020). Obyek penelitian ini adalah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dengan alasan Kabupaten Sorong merupakan Kabupaten Induk yang sudah dimekarkan. Sebagai Kabupaten Induk, Kabupaten Sorong menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah hasil pemekaran. Hal ini berarti bahwa praktek pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sorong menjadi tolak ukur bagi pemerintah desa di Pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran. Oleh sebab itu apabila pemerintah desa di Kabupaten Sorong mampu melakukan pencegahan *fraud* secara optimal maka diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah desa di Kabupaten /Kota hasil pemekaran untuk melakukan hal yang sama. Distrik Aimas dipilih sebagai sampel dikarenakan distrik Aimas merepresentasikan Kabupaten Sorong menurut jumlah penduduk, ragam suku yang mendiami dan tingkat perekonomian masyarakat, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa, dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Desa/Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong)."

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1. Sumber Data, Populasi dan Sampel

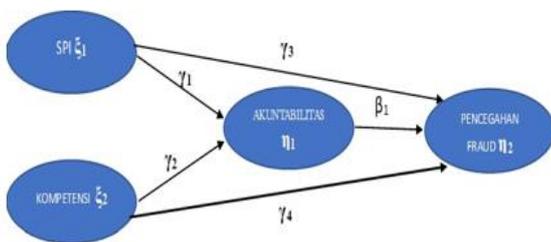
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penggunaan Teknik survey kuesioner yang didistribusikan menggunakan pos (*mail survey*). Selain itu, data yang diperoleh juga dari metode wawancara dengan partisipan yaitu Kepala Bidang Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong. Adapun populasi penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa di wilayah Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Jumlah populasi sebanyak 231 orang yang meliputi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) dengan kriteria responden yang sudah bekerja selama 1 tahun atau lebih yang memiliki

pemahaman yang memadai mengenai SPIP dan memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola keuangan desa sehingga diharapkan mampu merealisasikan akuntabilitas dan mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Penentuan kriteria tersebut merupakan Teknik sampling yaitu purposive sampling atau penyampelan dengan kriteria. Proporsi perhitungan perhitungan sampel dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Hair, et. al berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum. Dalam perhitungan sampel minimum didapatkan sampel sebanyak 81 responden, namun dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 120 responden atau 150% dari sampel minimum. Dari 120 kuesioner yang didistribusikan, diterima kembali sebanyak 108 kuesioner, yang 12 kuesioner tidak kembali.

**2.2. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik Partial Least Square (PLS) dengan bantuan program WarpPLS versi 7.0 karena dapat menguji hubungan yang kompleks dengan banyak konstruk dan banyak indikator (Ghozali, 2020). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : analisis statistik deskriptif, evaluasi model pengukuran atau outer model (pengujian validitas: konvergen dan diskriminan, pengeujian reliabilitas) serta evaluasi model struktural atau inner model (*Uji R-Squared*, *Uji Partial F-test*, Uji relevansi prediktif, dan signifikansi hubungan jalur).

**2.3. Model Persamaan Struktural**



**Gambar 1.** Model Penelitian

Adapun model persamaan struktural dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Persamaan Struktural I**

$$\eta_1 = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \zeta$$

Keterangan:

- $\eta_1$ = konstruk laten endogen akuntabilitas
- $\gamma_1$ = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP terhadap konstruk laten endogen akuntabilitas.
- $\gamma_2$ = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen kompetensi terhadap konstruk laten endogen akuntabilitas pengelolaan dana desa.

$\xi_1$ = konstruk laten eksogen SPIP.

$\xi_2$ = konstruk laten eksogen kompetensi.

$\zeta$ = *error model*.

**2. Persamaan Struktural II**

$$\eta_2 = \gamma_3\xi_1 + \gamma_4\xi_2 + \beta_1\eta_1 + \zeta$$

Keterangan:

$\eta_2$ = konstruk laten endogen pencegahan *Fraud*.

$\gamma_3$ = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen SPIP terhadap konstruk laten endogen Pencegahan *Fraud*.

$\gamma_4$ = koefisien pengaruh konstruk laten eksogen Kompetensi terhadap konstruk laten endogen Pencegahan *Fraud*.

$\beta_1$ = koefisien pengaruh konstruk laten endogen Akuntabilitas terhadap konstruk laten endogen Pencegahan *Fraud*.

$\xi_1$ = konstruk laten eksogen SPIP.

$\xi_2$ = konstruk laten eksogen Kompetensi.

$\eta_1$ = konstruk laten endogen Akuntabilitas.

$\zeta$  = *error model*.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Hasil Penelitian**

**Model Pengukuran (*Outer Model*)**

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dalam menguji pertanyaan dan indikator dari suatu instrumen dalam model pengukuran atau outer model dapat dinyatakan bahwa semua indikator dalam angket (kuesioner) penelitian ini sudah reliabel, dan dapat digunakan untuk penelitian.

**Model Struktural (*Inner Model*)**

Berdasarkan hasil penelitian dalam model struktural atau inner model dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) variabel akuntabilitas menunjukkan adanya hubungan yang lemah, sedangkan variabel pencegahan *fraud* menunjukkan adanya hubungan moderat terhadap sistem pengendalian intern pemerintah.

Nilai *Adjusted R-squared* variabel akuntabilitas sebesar sebesar 0,162 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat mempengaruhi variabel akuntabilitas sebesar 16,2% dan sisanya sebesar 83,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Selain itu, nilai *Adjusted R-squared* variabel pencegahan *fraud* sebesar 0,681 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah dapat mempengaruhi variabel pencegahan *fraud* sebesar 68,1% , dan sisanya sebesar 31,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

**Analisis Jalur**

Analisis jalur dalam model penelitian ini yaitu seperti berikut :

a. Analisis Jalur I

- 1) Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas.
  - 2) Variabel kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas.
- b. Analisis Jalur II
- 1) Variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud*.
  - 2) Variabel akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud*.
  - 3) Variabel kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pencegahan *fraud*.

**Tabel 1.** Kriteria dan Rule of Thumb Signifikan Hubungan Jalur

Kriteria	Rule of Thumb
Signifikansi Hubungan Jalur	$P\text{-Value} < 0,025$ (Level Signifikansi = 2,5%)

Untuk mengetahui signifikansi hubungan jalur sebagaimana dinyatakan diatas digunakan *rule of thumb* bahwa  $P\text{-Value} < 0,025$  atau taraf signifikan sebesar 2,5%. Artinya apabila angka signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 2,5% maka kesimpulannya terdapat pengaruh atau sebaliknya apabila angka signifikan lebih besar dari taraf signifikansi 2,5% maka kesimpulannya tidak berpengaruh.

### 3.2. Pembahasan

- 1) Hasil uji hipotesis pertama (H1) menunjukkan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas berkategori baik dan akuntabel. Dalam analisis tersebut semakin baik sistem pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ichlas (2014), Aramide (2015), Sari (2017), Martini (2019) dan Ayem (2020) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas.
- 2) Hasil uji hipotesis kedua (H2) menunjukkan H2 ditolak. Hal ini disebabkan bahwa dimana latar belakang pendidikan sebagian besar responden di dominasi oleh lulusan SMA. Meski hanya di dominasi oleh lulusan SMA, dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa akuntabilitas

pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas dalam pengelolaan dana desa sudah mampu berkategori akuntabel. Meskipun demikian, tingkat kompetensi tersebut dinilai cukup lemah ketika nantinya diperhadapkan dalam pengelolaan dana desa yang sangat besar. Oleh karena itu, agar semakin meningkatkan kompetensi aparatur pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas, BPKAD seharusnya dapat secara rutin melakukan pendampingan kegiatan pelatihan. Dengan demikian hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama et. al. (2017), Kharisma dan Widjantie (2021), Suharti dan Rumsari (2021) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

- 3) Hasil uji hipotesis ketiga (H3) menunjukkan H3 diterima. Hal ini selaras dengan Stewardship Theory yang mendeskripsikan keberadaan pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya dan diandalkan, akan melakukan tindakan yang baik yaitu mencegah *fraud* untuk kepentingan bersama. Analisis tersebut memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian intern yang terdapat pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong sudah baik dan sangat efektif dalam meminimalisir tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Joseph (2015), Atmadja (2017), Adeleke (2019), Laksmi (2019) dan Yusuf (2021) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- 4) Hasil uji hipotesis keempat (H4) menunjukkan H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas berkategori sangat baik dan sangat efektif dalam meminimalisir tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Semakin baik mekanisme pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntabilitas suatu organisasi, maka dalam praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa akan semakin mudah dicegah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2013),

Beawiharta (2014), Jannah (2016), Larasati (2019) dan Saputra (2020) yang sama-sama menyimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

- 5) Hasil uji hipotesis kelima (H5) menunjukkan H5 diterima. Hal ini hasil data deskriptif diketahui bahwa kompetensi aparatur pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas berkategori sangat kompeten. Hasil tersebut secara jelas menggambarkan bahwa dengan tingkat kompetensi aparatur pemerintah desa yang ada saat ini, sudah mampu meminimalisir tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan dana desa pada pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huslina (2015), Widiyarta (2017), Wahyuni (2018), Wonar (2018) dan Laksmi (2019) yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 6) Hasil uji hipotesis keenam (H6) menunjukkan H6 diterima. Hal ini menunjukkan akuntabilitas dalam implementasi sistem pengendalian internal mampu mempengaruhi terhadap pencegahan *fraud*. Artinya bahwa sistem pengendalian intern pemerintah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akan berdampak pada semakin meningkatnya aktivitas pencegahan *fraud*. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah desa dengan baik agar akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik pula sehingga mampu mengoptimalkan pencegahan *fraud* dalam praktik pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran dan bukti yang jelas bahwa semakin kuat dan optimal sistem pengendalian intern yang ada di dalam pemerintahan desa, maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana melalui proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang lebih tepat dan efektif, sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi terjadinya kesalahan ataupun kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh aparatur pemerintah desa.
- 7) Hasil uji hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan H7 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa

akuntabilitas sebagai imbas dari kompetensi para aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana, tidak mampu mempengaruhi peningkatan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya *fraud*. Artinya akuntabilitas tidak dapat diharapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan *fraud*. Penelitian ini telah membuktikan bahwa hanya dengan melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintah desa, baik kompetensi secara individu maupun kompetensi secara tim kerja yang dapat digarap akan dapat mencegah sejak awal, dan secara optimal terjadinya *fraud*.

Dengan demikian, hasil ini telah memberikan gambaran dan bukti yang jelas bahwa akuntabilitas pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas dalam mengelola dana, tidak mampu meningkatkan pengaruh tingkat kompetensi aparatur desa terhadap peningkatan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya kesalahan ataupun kecurangan (*fraud*) yang mungkin akan dilakukan oleh aparatur pemerintah kampung di lingkungan Distrik Aimas.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

- a. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas dengan pengujian P-Value menghasilkan 0,001 ( $< 0,025$ ). Maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H1 diterima .
- b. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas dengan pengujian P- Value menghasilkan 0,386 ( $> 0,025$ ). Maka Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H2 ditolak.
- c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* dengan pengujian P-Value menghasilkan 0,024 ( $< 0,025$ ). Maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H3 diterima.
- d. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan *Fraud* dengan pengujian P-Value menghasilkan 0,022 ( $< 0,025$ ). Maka Akuntabilitas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H4 diterima.

- e. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pencegahan *Fraud* dengan pengujian P-Value menghasilkan 0,001 ( $< 0,025$ ). Maka Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H5 diterima.
- f. Pengaruh Akuntabilitas memediasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* dengan pengujian pendekatan Zhao, Lynch, dan Chen (2010) menghasilkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* signifikan. Maka Akuntabilitas mampu memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H6 diterima.
- g. Pengaruh Akuntabilitas memediasi Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* dengan pengujian pendekatan Zhao, Lynch, dan Chen (2010) menghasilkan pengaruh langsung signifikan namun pengaruh tidak langsung (*indirect*) tidak signifikan. Maka Akuntabilitas tidak mampu memediasi pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di lingkungan Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan demikian H7 ditolak.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang peneliti hadapi selama melakukan penelitian, maka saran yang diajukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu :

- a. Pemerintah Daerah sebaiknya melaksanakan pengendalian intern secara berkualitas terkait pengelolaan dana desa agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa semakin meningkat.
- b. Pemerintah Daerah sebaiknya membuat kebijakan tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar mampu semaksimal mungkin mencegah tindakan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- c. Pemerintah Daerah sebaiknya secara konsisten dan rutin melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) mengenai pengelolaan dana desa bagi

aparatur pemerintah desa agar kompetensi aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa semakin meningkat.

- d. Pemerintah Daerah sebaiknya menerbitkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Implementasi Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa yang menekankan pada prinsip akuntabilitas sehingga mencegah sejak awal munculnya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- e. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan upaya yang sungguh- sungguh dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diterapkan terkait pengelolaan dana desa benar-benar optimal dalam mencegah terjadinya *fraud*.
- f. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi yang lebih luas, agar hasil penelitian nantinya dapat digeneralisasikan.
- g. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode pengumpulan data lain, selain *mail survey* yang berpotensi menimbulkan bias jawaban responden.

#### 5. KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

##### 5.1. Keterbatasan

- a. Metode pendistribusian menggunakan *mail survey* yang berpotensi menimbulkan bias jawaban responden.
- b. Kesulitan didalam mengumpulkan kembali kuesioner yang dikarenakan mengingat dan menghormati kesibukan responden. Selain itu, dengan kondisi yang tidak memungkinkan adanya virus covid-19 sehingga ada beberapa perangkat desa yang belum bekerja secara normal menyebabkan harus menunggu sampai responden kembali bekerja. Hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dan terdapat kelemahan-kelemahan jawaban yang diberikan sehingga belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- c. R-squared persamaan struktural I hanya sebesar 0,177 yang berarti kemampuan prediksi persamaan struktural I berkategori rendah. Sedangkan R-squared persamaan struktural II sebesar 0,690 yang berarti kemampuan prediksi persamaan struktural II berkategori moderat.
- d. Instrumen pengukuran variabel kompetensi aparatur pemerintah desa kurang adanya keterkaitan dengan variabel akuntabilitas, artinya pada instrumen variabel kompetensi aparatur pemerintah desa lebih menekankan kemampuan responden dalam menjalankan tugas administrasi. Oleh sebab itu, hasil dari penelitian variabel

kompetensi aparatur pemerintah desa hanya di dominasi dengan lulusan SLTA.

## 5.2. Implikasi

### a. Implikasi Teoritis

- 1) Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas diterima memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas. Bukti empiris ini sejalan dengan Stewardship Theory bahwa pemerintah desa seharusnya menjalankan amanah yang diembannya dengan sebaik-baiknya melalui praktik pengelolaan dana desa yang akuntabel.
- 2) Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* diterima memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Bukti empiris ini sejalan dengan Stewardship Theory bahwa pemerintah desa seharusnya mengelola dana desa berdasarkan prinsip good governance yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas.
- 3) Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* diterima memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Bukti empiris ini sejalan dengan *Fraud Triangle Theory* bahwa capability pemerintah desa yang tercermin pada akuntabilitas memiliki manfaat signifikan untuk pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 4) Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* diterima memberikan memberikan bukti empiris bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Bukti empiris ini sejalan dengan Stewardship Theory bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa menjadi kebutuhan bagi pemerintah desa untuk melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 5) Hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel akuntabilitas memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud* diterima memberikan bukti empiris bahwa

akuntabilitas mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencegahan *fraud*. Bukti empiris ini sejalan dengan Stewardship Theory dan *Fraud Triangle Theory* yang mendeskripsikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

### b. Implikasi Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah yaitu pemerintah daerah membuat kebijakan tentang penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan melakukan pengawasan/pengendalian intern atas pengelolaan dana desa melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Inspektorat Daerah agar secara optimal dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
- 2) Bagi Aparatur Pemerintah Desa yaitu aparatur pemerintah desa berkenan meningkatkan kompetensinya di bidang pengelolaan dana.

## 6. REFERENSI

- Adeleke, O. K., Segun, I. B., & Olaoye, A. I C. (2019). Impact of Internal Control on *Fraud* Prevention in Deposit Money Banks in Nigeria. *Nigerian Studies in Economics and Management Sciences*, 2(1), ISSN 2645-3061, 42-51.
- Aramide, S.F., & Bashir, M.M. (2015). The Effectiveness of Internal Control System and Financial Accountability at Local Government Level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management (IMPACT:IJRNM)*, 3, ISSN (E) 2321-886X ISSN (P) 2347-4572,1-6.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67-82.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), p-ISSN 2086-3748. e-ISSN 2086-3748.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1), 77-16, P-ISSN 2302-514X e-ISSN 2303-1018.

- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis)*, 1(1), 1-15.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 160-169.
- Babulu, N. L. (2020). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), ISSN: 2503-3093 (Online), 18-26.
- Beawiharta, I., & Rahayu, S. (2014). Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan pada Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2014. *e-Proceeding of Management*, 1(3), 226-237.
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*, VIII (1), 10-20.
- Bustam. (2020). Haris : Kasus Dana Desa di Kampung Warga Nusa II Harus Jadi Pelajaran. <https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/haris-kasus-dana-desadi-kampung-warga-nusa-ii-harus-jadi-pelajaran.html>.
- Cressey, D. (1953). *Other People's Money*, dalam: *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS N. 99*. Skousen et. al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*, 13, 53-81.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64.
- Durnila, K., & Santoso, C. B. (2018). Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. *Measurement*, 12(1), p-ISSN 2252-5394, 87-102.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. A., & Yuniasih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.
- Ghozali, I. (2020). *Partial Least Squares Konsep Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WrapPLS 7.0 Edisi 4*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hair et. al. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 2th Edition*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: SAGE.
- Huda, N., Sadeli, D., & Hermiyetti. (2018). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, X(3), ISSN 2086-0412.
- Huslina, H., Islahuddin & Syah, N. (2015). Pengaruh Integritas Aparatur, Kompetensi Aparatur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), ISSN 2302-0199, 55-64.
- Ichlas, M., Dr. Hasan Basri. M.Com, Ak & Dr. Muhammad Arfan, SE, M.Si, Ak, CA. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4), ISSN 2302-0164, 76- 84.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2019). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desapaling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>.
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya). *Jurnal AKRUAL*, 7(2), 177-191.
- Joseph, O. N., Albert, O., & Prof John B. (2015). Effect of Internal Control on *Fraud* Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of*

- Business and Management Invention, 4(1), 47-57.
- Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Rembang). (Skripsi). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Laksmi, P. S. P. & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 26(3), ISSN: 2302-8556, 2155-2182.
- Larasati, Y. S., & Surtikanti. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* di dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Riset Empiris pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan). JAFTA Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, 1(1), 31-43.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing.
- Mahdi, S. A. R. & Darwis, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Aparat Pemerintah Desa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, VI(2), ISSN: 2442-3017 (Print) ISSN: 2597-9116 (Online), 184-198.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi, 2(1), 106-123.
- Mathis, L. R., & Jackson, H. John. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Salemba 4. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Romadaniati., Taufik, Taufeni & Nasir. Azwir. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkulu). Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(3) September 2020, e-ISSN: 2685-5607, 227- 237.
- Rosalina, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kesesuaian Kompensasi, Komitmen Organisasi dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Dana Desa dengan Ketaatan Aturan Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. (Skripsi). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priandani, N. M. I., & Putra, I Gst. B. Ngr. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 10(2), 168-176.
- Saputri, S. M. A. (2020). Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. (Skripsi). Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sari, N., Ghozali, I & Tarmizi, A. (2017). The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability: The Emperical Study in Indonesia State Universities. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Vol. 8 Issue. 9 September 2017. ISSN Print: 0976-6308 ISSN Online: 0976- 6316 pp. 157-166.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3) Seri E Agustus 2019, 1443-1457, ISSN: 2656-2649 (Online).
- Sariwati, N. W. & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan

- (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa. Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, Juli 2020, e-ISSN 2798-8961.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia, Juli 2020, e-ISSN 2798-8961.
- Sofia, I. P. (2020). The Impact of Internal Control and Good Corporate Governance on *Fraud* Prevention (Call for Paper-2nd International Seminar on Accounting Society). Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 2(1), 251-257.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 17(1), 57-74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Usman, B. A., Taufik, T & Rasuli, M. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). Jurnal Ekonomi, 23(4) Desember 2015, 18-34.
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2018). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Inovasi dan Bisnis (INOVBIJ), 6(2), 189-194.
- Walyati, F. N., & Farida. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Se-Kecamatan Muntilan). The 3rd FEB ENEFECIUM. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Widiyarta, K., Herawati., N. T., & Atmadja, A.T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Wisteblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa". e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-12.
- Wolfe, D. T. & Hermanson, D. R. (2004). The *Fraud* Diamond: Considering The Four Elements of *Fraud*. CPA Journal. 74(12), 38-42.
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, 1(2), 63-89.
- Yusuf, M., Aswar., Ibrahim, I., Yusdhanier & Waty, F. I. (2018). Pengaruh Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan *Fraud* Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Se- Kecamatan Adonara Tengah). Jurnal Akuntansi dan Ekonomi (JAE), 6(2), e-ISSN 2541-0180 p-ISSN 2721-9313.
- Zhou X., Lynch Jr, J.G., & Chen Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and Truths about Mediation Analysis. Journal of Consumer Research, 37, 197-20.